

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA TANJUNGPINANG
(Studi Terhadap Kawasan Lembah Purnama)**

Mardiana¹, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri², Kustiawan³
amardiana486@gmail.com

Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that the slum area has indeed become an important work for every Regional Government, including the Tanjungpinang City Government. The progress of regional arrangement as stipulated in Regional Regulation No. 10 of 2014 contextually is very good. It's just that the maximum implementation is needed in order to achieve the expectations. The problem in this research is how the implementation of Regional Regulation No. 10 of 2014 in the Purnama Valley area of Tanjungpinang City. Thus, the purpose of this study was to determine the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2014 in the Lembah Purnama area of Tanjungpinang City. The subjects of this study were employees of the Tanjungpinang City Bapelitbang Office. Furthermore, the object of this research is the implementation of policies in the form of local regulation No. 10 of 2014. This type of research is descriptive with a qualitative approach. Research informants numbered 6 (six) people consisting of Head of Agency, Head of Division and Head of Sub Division. Data collection is done through observation, interviews and documentation which then the results of the data are analyzed with qualitative descriptive techniques. This study found that the implementation was carried out by implementing the Bureaucracy in Tanjungpinang City Research and Development Agency, which was quite good because it already had contributions and a working mechanism. In addition to having a good organizational structure, Bapelitbang also has its own rules governing the implementation of a special policy for the implementation of Regional Regulation No. 10 of 2014 in the Purnama Valley region. The resources they own, in fact, also support this implementation. Staff who are sufficiently qualified in terms of quality and quantity, information related to local regulations understood by all personnel, authority determined according to portions and can change according to needs and facilities to carry out very adequate implementation. The communication that was built also was in accordance with the principles of communication in general. There is internal and external communication seen there. Communication with the community can also occur such as the phenomenon of obtaining a Building Permit in the Purnama Valley area that needs to be assessed so that there is no conflict between regional development and the provisions in Local Regulation Number 10 of 2014.

Keywords: Policy Implementation, Regional Regulation RT/RW

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

¹ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

¹ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

I. Pendahuluan

Salah satu permasalahan akibat penataan Ruang kota yang belum baik adalah banyak bermunculan kawasan kumuh. Permasalahan permukiman kumuh sudah sejak lama dikaji, baik

oleh pemerintah, perguruan tinggi, swasta, maupun masyarakat. Kata “kumuh” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kotor atau cemar. Jadi, bukan padat, rapat becek, bau, atau tidak teraturnya, tetapi justru kotornya yang menjadikan sesuatu dapat dikatakan kumuh. Beberapa penelitian tentang permukiman kumuh yang sudah dilakukan di Indonesia, (Ruhaida dan Sunarti, 2012; Eni Endang Surtiani, 2006; Junaedi Mulyo Prayidno, 2007; Ngakan Putu Sueca, 2004; Ety Soesilowati, 2007), ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh. Bahwa, keadaan geografis dapat mempengaruhi kualitas lingkungan, serta jumlah penduduk yang tinggi mempengaruhi jumlah lahan atau hunian tempat tinggal. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya permukiman kumuh di Indonesia. Dari beberapa faktor tersebut ada yang belum banyak diteliti, yaitu terkait implementasi kebijakan pemerintah yang tidak tegas dan mudah diabaikan masyarakat Tanjungpinang sebagai kota besar yang ada permukiman kumuh juga. Berbicara tentang permukiman tentu tidak lepas dari pengetahuan kita mengenai kondisi saniter atau keadaan lingkungan yang bersih atau baik untuk kesehatan, Pada dasarnya sanitasi juga biasa disebut dengan istilah penyehatan. Beberapa dekade terakhir ini kita sering dibincangkan dengan adanya permasalahan permukiman yaitu terdapatnya permasalahan permukiman kumuh di beberapa kawasan di kota Tanjung Pinang. Permasalahan sanitasi permukiman di kota Tanjungpinang umumnya dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat sanitasi di daerah dengan jumlah penduduk yang padat.

Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain adalah Masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, utamanya pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Hal ini belum termasuk pada keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, kontribusi pendanaan atau pun lahan, dll. Pada tahun 2016 luas permukiman kumuh saat itu mencapai 38.431 hektare yang terdiri dari 23.473 hektare di perkotaan dan 11.957 hektare di perdesaan (bps.go.id). Untuk penanganan kota kumuh di Tanjungpinang, sudah dilakukan pemetaan. Dari hasil pemantauan yang dilakukan ternyata Ada tujuh kawasan permukiman di Kota Tanjungpinang yang masuk dalam kategori kawasan permukiman kumuh, yakni Pelantar Sulawesi, Kawasan Pantai Impian, Kawasan Lembah Purnama, Kawasan Suka Berenang, Kawasan Tanjung Unggat, Kawasan Kampung Bugis, dan Kawasan Senggarang. Salah satu lokasi kumuh yang berada di Jalan Raja Haji Fisabilillah KM 8 sudah diusulkan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa dengan Lahan yang dibutuhkan seluas 5.000 hektare. Sedangkan 2 untuk penanganan kawasan kumuh di kawasan Lembah Purnama dilakukan pembangunan infrastruktur dasar, selain itu warga juga didorong untuk gotong royong membersihkan lingkungan sekitarnya agar mengurangi jumlah sampah maupun buruknya sanitasi di lingkungan permukiman tersebut. Besarnya target yang diinginkan yaitu 100 persen akses air minum, nol persen kawasan permukiman kumuh dan 100 persen sanitasi (100-0-100) tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah sendiri namun membutuhkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kota bersih atau dengan sanitasi yang layak. Namun demikian, perubahan Perda tersebut tidak merubah tatanan perencanaan terhadap permukiman kumuh dimana salah satunya kawasan Lembah Purnama masuk dalam catatan tersebut. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Ayat 3 poin D Perda Nomor 10 Tahun 2014 disebutkan bahwa rencana tata ruang dan wilayah meliputi wilayah Lembah Purnama di Kecamatan Bukit Bestari. Oleh karena itu persoalan permukiman kumuh sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dengan menyadari permasalahan ini, peneliti mengambil judul mengenai “Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Wilayah di

Kawasan Lembah Purnama Kota Tanjungpinang”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal (pasolong, 2013:3).

Faktor yang berhubungan tersebut dalam hal ini mungkin berupa konsep, data empiris, pengalaman atau unsur lainnya. Untuk mencapai sasaran perlu di rumuskan permasalahannya sehingga akan diketahui kemana arah dan tujuan penelitian itu. Maka dari itu berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat di rumuskan permasalahannya yaitu “Bagaimana Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Wilayah di Kawasan Lembah Purnama Kota Tanjungpinang”. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Wilayah di Kawasan Lembah Purnama Kota Tanjungpinang dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang Wilayah di Kawasan Lembah Purnama Kota Tanjungpinang.

II. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mengumpulkan informasi dan membuat deskriptif tentang suatu fenomena menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian secara rinci (Tohirin, 2012: 2). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2009: 11) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sasaran yang tepat, sifat-sifat individu, keadaan gejala-gejala dari kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala-gejala yang lain dalam masyarakat (objek penelitian). Penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan serta variabel-variabel menurut pandangan dan definisi partisipan. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status variabel, gejala, atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Fokus dari implementasi pasal 95 UU no 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan permukiman dan mengambil locus di Kawasan Lembah Purnama kota Tanjungpinang.

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data primer yang merupakan suatu kebutuhan dalam sebuah penelitian, maka peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari : a. Observasi Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diselidiki (Hadi, 1999: 136). Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang pola belanja masyarakat suku laut di Pasar Tradisional Kawal Kangka terkait interaksi sosial. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dan tidak langsung. Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap objek di tempat terjadinya peristiwa. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Misalnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide (monitor) atau rangkaian foto (Hadari Nawawi, 2007: 106).

b. Wawancara Wawancara atau Interview adalah sebuah percakapan langsung (face to face) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab (W. Gulo, 2004: 119). Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah struktur wawancara yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan pengungkapan makna, yakni Penulis mengajukan pertanyaan dan kemudian Penulis memilih sendiri susunan kata yang tepat, sehingga dapat dengan mudah mengajukan informasi mendalam dari informan tanpa terfokus pada pertanyaan yang telah dipersiapkan.

c. Dokumentasi Dokumentasi adalah data yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui dokumen-dokumen tertulis. Penulis juga memperoleh data dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari teori dari buku-buku bacaan, serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut (Suharsimi dan Arikunto, 2006: 59). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik perbandingan tetap (constant comparative method). Tohirin (2012: 148-149) menyatakan analisis data dengan perbandingan tetap dilakukan mulai dari reduksi data yaitu mengidentifikasi satuan atau unit dalam data kemudian kategorisasi yaitu memilah-milah setiap satuan data untuk dianalisis.

III. Hasil dan Pembahasan

Berbicara tentang permukiman tentu tidak lepas dari pengetahuan kita mengenai kondisi saniter atau keadaan lingkungan yang bersih atau baik untuk kesehatan, Pada dasarnya sanitasi juga biasa disebut dengan istilah penyehatan. Beberapa dekade terakhir ini kita sering dibincangkan dengan adanya permasalahan pemukiman yaitu terdapatnya permasalahan pemukiman kumuh di beberapa kawasan di kota Tanjungpinang.

3.1. Struktur Birokrasi Berkenaan dengan penelitian ini, dalam suatu implementasi kebijakan yang berwujud peraturan, tentu tidak terlepas dari birokrasi yang mengaturnya. Seperti halnya izin mendirikan bangunan, sanitasi, pengurusan lahan dan sebagainya. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Infrastruktur dan 6 Pengembangan Wilayah Bapelitbang Kota Tanjungpinang Heni Ari Putranti, ST, MT sebagai berikut: “Terkait birokrasi dalam menerapkan Perda itu tentu tidak hanya di sini, masing-masing OPD punya peranan masing-masing dalam tatanan birokrasi yang mengikat. Misalnya saja untuk mendirikan bangunan, wajib dalam pengurusan IMB. Nah untuk IMB itu banyak pihak yang terlibat mulai dari RT/RW dalam pengantarnya, kemudian Kantor Camat dan terus berlanjut sesuai mekanismenya. Jadi intinya birokrasi yang memang sangat mengikat dan itu menjadi suatu aturan yang diwajibkan” (Wawancara 20 Desember 2018). Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa sejatinya telah ada birokrasi yang mengikat dalam menjalankan suatu kebijakan. Penulis ingin merambah ke hal yang sedikit lebih luas, bahwasanya kebijakan Pemerintah bisa dalam bentuk peraturan, program, kegiatan dan semacamnya. Keseluruhan kebijakan itu bisa lahir dari hasil pemikiran, gagasan, hasil musyawarah/rapat, kondisi/keadaan maupun sebuah desakan. Namun demikian, apapun bentuk kebijakan dan apapun sebab lahirnya sebuah kebijakan, saat akan mengimplementasikannya tentu tidak terlepas dari aturan birokrasinya, termasuklah Perda Nomor 10 Tahun 2014 ini. Menelisis

lebih lanjut tentang kawasan Lembah Purnama Kota Tanjungpinang terkait implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang Fitri Setiadi, ST. Hasil wawancara tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut : “Pada tahun 2016 luas pemukiman kumuh saat itu mencapai 38.431 hektare yang terdiri dari 23.473 hektare di perkotaan dan 11.957 hektare di perdesaan. Untuk Lembah Purnama sendiri masuk dalam tujuh kawasan pemukiman kumuh di Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2017 lalu telah dimulai penataan dari Pemko untuk semua kawasan tersebut termasuk Lembah Purnama. Mulai dari relokasi bangunan, pembersihan dan perapian” (Wawancara tanggal 21 Desember 2018). Dari kutipan wawancara tersebut penulis semakin memahami bahwa dalam proses implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2014 di kawasan Lembah Purnama telah berjalan sesuai dengan prosedur birokrasi yang berlaku. Lembah Purnama yang tercatat sebagai salah satu kawasan kumuh dari beberapa kawasan lainnya yakni Pelantar Sulawesi, Kawasan Pantai Impian, Kawasan Suka Berenang, Kawasan Tanjung Unggat, Kawasan Kampung Bugis dan Kawasan Senggarang semuanya mendapatkan penataan pemukiman. Ini semua merupakan langkah dan upaya menerapkan Perda Nomor 10 Tahun 2014 agar dalam pembangunan maupun pengembangan kawasan ke depan bias sejalan dengan RTRW yang telah dirumuskan.

- 3.2. Sumber Daya Untuk mengetahui bagaimana keadaan sumber daya manusia (staf) yang ada di Bapelitbang Kota Tanjungpinang, Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Fitri Setiadi, ST dan didapatkan hasil sebagai berikut : 7 “Jumlah staf atau katakanlah personil yang ada di Bapelitbang sampai saat ini bisa dikatakan mencukupi. Semua tugas dan fungsi Bapelitbang dibagi ke dalam beberapa Bagian dan setiap Bagian mempunyai stafnya masing-masing. Artinya sudah cukup memadai, hanya saja perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi beberapa SDM, sebab ada beberapa personil baru yang masih membutuhkan bimbingan untuk melaksanakan tugasnya” (Wawancara tanggal 21 Desember 2018). Dari wawancara tersebut diketahui bahwa jumlah staf yang ada di Kantor Bapelitbang Kota Tanjungpinang terbilang mumpuni. Artinya setiap lini dengan tugas dan fungsi yang berbeda dikerjakan oleh orang yang berbeda pula. Hanya untuk peningkatan kemampuan diperlukan pembinaan dan pelatihan. Ini bukanlah suatu hambatan berarti, sebab setiap orang apalagi yang terbilang baru dalam melaksanakan suatu tugas tentunya memerlukan pengarahan dan pengawasan demi progres yang baik sesuai harapan.
- 3.3. Disposisi Disposisi dalam implementasi kebijakan tidak berarti penyerahan suatu perintah semata. Namun lebih kepada kecenderungan seseorang untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah atasan. Kecenderungan ini berawal dari berbagai factor, mulai dari kepentingan pribadi sampai kepada karakter orang itu sendiri yang sulit untuk diberikan perintah. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi

kendala yang serius. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapelitbang Kota Tanjungpinang Heni Ari Putranti, ST, MT dapat dilihat dalam petikan berikut : “Kami punya persyaratan khusus untuk mengisi setiap posisi kosong di sini. Mungkin dengan instansi lain juga punya beberapa kriteria khusus sesuai dengan kebutuhan. Selain kualifikasi pendidikan, semua staf di sini mendapatkan pembinaan yang cukup baik untuk membentuk karakternya, walaupun tidak secara langsung. Di sini suasana kerja dibuat nyaman mungkin dan anatara atasan dengan bawahan sedapat mungkin diupayakan tidak ada jarak atau sekat yang membatasi. Intinya secara birokrasi memang ada pimpinan dan bawahan, namun dalam aplikasinya satu dengan yang lainnya lebih kepada nuansa kekeluargaan. Harapannya semua bisa nyaman melaksanakan tugas dan saat mendapat perintah tidak ada yang merasa didekte, supaya semua senang kalau mendapat instruksi” (Wawancara tanggal 20 Desember 2018). Di sini terlihat jelas bagaimana strategi Bapelitbang Kota Tanjungpinang dalam mengantisipasi adanya perilaku menyimpang anggotanya saat diberikan perintah untuk melaksanakan suatu tugas. Jika ditarik dan dikaji dengan rumus 8 organisasi, di sini terlihat adanya upaya pembentukan iklim kerja yang mengharapkan semua orang di dalamnya merasa nyaman dan tidak terbebani. Lebih lanjut lagi penulis melakukan pengkajian lebih lanjut terkait adanya insentif bagi mereka yang telah baik dalam hasil kinerja. Dari wawancara dengan Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapelitbang Kota Tanjungpinang Heni Ari Putranti, ST, MT dan didapatkan hasil sebagai berikut : “Insentif tidak ada, tapi beberapa bentuk reward atau penghargaan atas prestasi kerja ada. Misalnya ada yang dinilai baik oleh pimpinan atas kinerjanya, biasanya akan diberikan penghargaan dan tentunya menerima kepercayaan lebih untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya” (Wawancara tanggal 20 Desember 2018). Penulis melihat adanya upaya positif yang dibangun oleh pimpinan di Bapelitbang Kota Tanjungpinang. Dari upaya seleksi personil yang akan menempati semua posisi, sampai kepada pemberian penghargaan bagi mereka yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu alasan para staf akan semakin bersemangat saat menerima instruksi maupun arahan dari pimpinan. Secara tidak langsung juga mereka malah akan berlomba-lomba untuk menghasilkan kinerja yang maksimal.

3.4. Komunikasi Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Dari wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kota Tanjungpinang didapatkan hasil sebagaimana dalam kutipan berikut: “Kami punya tradisi baik di sini yang membuat komunikasi berjalan lancar. Tidak ada batasan untuk komunikasi vertikal apalagi horizontal. Zaman kan sudah maju, lebih mudah untuk komunikasi. Kalau staf ingin meminta arahan terkait sesuatu hal, bisa berkomunikasi dengan Kepala Sub Bidang atau Kepala

Bidangnya langsung, nanti bisa langsung mendapat arahan atau bisa juga dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Badan selaku pimpinan tertinggi di kantor” (Wawancara tanggal 21 Desember 2018). Jalanan komunikasi di Bapelitbang Kota Tanjungpinang ternyata telah menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan komponen dalam ilmu komunikasi. Hasil wawancara tersebut juga menggambarkan bagaimana alur komunikasi yang terjadi di sana. Proses komunikasi yang seperti itu akan lebih menghemat waktu dan sesuai dengan azas efisiensi kerja, terlebih lagi akan mendapatkan informasi yang valid dan tentunya ini sesuai dengan azas efektivitas kerja. 9 Terkait dengan implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2014 di kawasan Lembah Purnama, Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapelitbang Kota Tanjungpinang Heni Ari Putranti, ST, MT didapatkan hasil sebagai berikut : “Kemarin pernah ada laporan dari PTSP sebab ada warga yang akan membangun bangunan besar di Lembah Purnama, semacam swalayan gitu. Kami turut dalam rapat tersebut untuk memastikan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan. Setelah dilakukan musyawarah dan peninjauan lapangan ternyata Izin Mendirikan Bangunannya memang tidak bisa diterbitkan karena bangunan tersebut nantinya akan memakan sedikit badan jalan dan itu melanggar ketentuan yang tertuang dalam Perda RTRW Kota Tanjungpinang” (Wawancara tanggal 20 Desember 2018). Hasil wawancara ini semakin memberikan gambaran bagaimana komunikasi memiliki peranan penting dalam implementasi suatu kebijakan. Tidak hanya komunikasi yang terjalin secara internal (semua orang yang ada di kantor Bapelitbang), namun juga komunikasi dengan instansi terkait lainnya bahkan komunikasi dengan masyarakat baik melalui aduan maupun saat melakukan pertemuan. Kawasan Lembah Purnama sejauh ini sudah mulai membaik dari segi tatanan bangunan. Pemukiman warga yang mulanya „semrawut“ kini sudah mulai „disolek“ oleh Pemerintah Kota. Secara real memang bukan suatu tugas yang mudah untuk melakukan penataan kembali kawasan-kawasan kumuh seperti Lembah Purnama agar sesuai dengan rancangan RTRW yang ditetapkan. Namun sejauh ini upaya itu sudah mulai terlihat dan berjalan dengan cukup baik. Bapelitbang sendiri selaku implementor dalam implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentunya telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja yang baik.

IV. Kesimpulan

Setelah diuraikan dan dianalisis dapat disimpulkan bahwa implelementasi Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah di kawasan Lembah Purnama oleh Bapelitbang Kota Tanjungpinang telah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan teori implementasi. Mulai dari birokrasi, sumber daya, disposisi dan komunikasi.

1. Birokrasi di Bapelitbang Kota Tanjungpinang terbilang cukup baik karena telah mempunyai auran maupun mekanisme kerja. Di samping memiliki struktur organisasi yang baik, Bapelitbang juga punya aturan tersendiri yang diatur untuk melakukan implementasi sebuah kebijakan khususnya untuk implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2014 di kawasan Lembah Purnama.
2. Sumber daya yang dimilikipun nyatanya turut mendukung implemtasi ini ini. Staf yang telah cukup mumpuni dari segi kualitas dan kuantitas, informasi terkait Perda yang dipahami oleh semua personil, wewenang 10 yang ditetapkan sesuai porsinya dan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan serta fasilitas untuk melakukan implementasi yang sangat memadai.

3. Disposisi dalam implementasi ini juga telah dimanipulasi dengan cukup baik. Mulai dari selektif dalam memilih personil sampai kepada pemberian penghargaan atas prestasi kerja anggota yang sangat berdampak baik bagi kinerja ke depannya.
4. Komunikasi yang dibangun juga telah sesuai dengan prinsip komunikasi secara umum. Ada komunikasi internal maupun eksternal yang terlihat di sana. Komunikasi dengan masyarakat pun juga dapat terjadi seperti fenomena pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di kawasan Lembah Purnama yang perlu dilakukan pengkajian agar tidak terjadi pertentangan antara pengembangan wilayah dengan ketentuan yang berlaku dalam Perda Nomor 10 Tahun 2014.

V. Daftar Pustaka

- Agustino. 2006. *Komunikasi Dasar*. Bandung: Alfabeta.
- Baedhowi. 2004. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bisri, Cik Hasan. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Edward, George C. 1990. *Kebijakan Politik*. Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Edwards III. 1980. *Dasar-dasar Kebijakan*. Bandung: Rosda Karya Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gulo, W. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Harsono, Hanifah Harsono. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Howlet, Micahel dan M. Ramesh. 1995. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremias T. 2007. *Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan*, Pidato Pengukuran Guru Besar pada 11 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mazmanian, Daniel A. dan Paul Sabatier. 1979. *Implementasi Kebijakan* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurdin dan Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta. MAPPI FH UI.
- Pasolong. 2013. *Metode penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Subandijah. 1996. *Filsafat Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Penelitian Deskriptif*. Jakarta: Grasindo.
- Supriono. 1998. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Suriyanti, Mery. 2018. *Penyelenggaraan Retribusi Perparkiran Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan Teori Masalahah (Studi di Kota Tanjungpinang Kecamatan Tanjungpinang Barat Provinsi Kepulauan Riau)*. Jurnal Skripsi. Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim.
- Syahida, Bayu Agung. 2014. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat)*. Jurnal Ilmiah. Tanjungpinang: UMRAH.
- Tachjan. 2006. *Dasar-dasar Organisasi*. Lombok: Holistica.
- Taslim, Budi.dkk. 2016.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan (Studi Kasus Pengelolaan Persampahan di Kota Tanjungpinang oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang). Jurnal Ilmiah. Tanjungpinang: UMRAH.

Tohirin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. Pendidikan politik Jakarta: Mitra Wacana Media 12 Wastra,

Pranata. 2006. Manajemen Edisi kedelapan Jilid 2. Jakarta: PT Indeks.

Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta. Perundang-undangan: UU No 1 Tahun 2011 Tentang Kawasan Permukiman Perda Nomor 10 Tahun 2014 Kota Tanjungpinang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.